

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi, naiknya harga barang-barang dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun seiring dengan berkembangnya kemampuan analisis para praktisi ekonomi yang menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara hanya akan menjadi bumerang dikemudian hari, potensi penerimaan dari pinjaman luar negeri akan semakin dikurangi.

Jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan Negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan lain sebagainya. Dalam karya tulis ini, penulis hanya membahas lebih lanjut tentang Pajak Pertambahan Nilai, karena Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi paling besar dibanding dengan pajak yang lainnya. Memang dilihat dari segi penerimaan, Pajak Panghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang

dapat dikenakan PPh. Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai, karena pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Teknis pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dilakukan beberapa kali berdasarkan pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa.

Didalam Pajak Pertambahan Nilai terdapat istilah pajak keluaran yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), jasa kena pajak atau impor barang kena pajak. Barang kena pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang

PPN. Selain pajak keluaran juga terdapat istilah pajak masukan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak, baik melalui proses impor ataupun ekspor barang kena pajak.

Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud (1) adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean. (*Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*). Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (2) adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean. (*Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*). Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP namun ia tetap terkena PPN dan dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN yang nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara. Mekanisme pengenaan PPN dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan melakukan pemungutan, perhitungan,

pembayaran dan melaporkan PPN pada setiap transaksi pada setiap bulannya. PKP yang telah melakukan pemungutan PPN atas penyerahan BKP atau JKP, harus memperhitungkan dengan Pajak Keluaran yang dimilikinya, dan apabila Pajak Keluaran lebih besar dengan Pajak Masukan pada suatu masa tertentu, maka selisihnya akan disetorkan ke kas negara. Apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka terjadi Lebih Bayar. Untuk meminta kelebihan pembayaran PPN bisa dilakukan dengan dua cara, dengan cara restitusi atau dengan cara kompensasi.

Apabila terjadi kelebihan pembayaran PPN, PKP biasanya akan segera mengkompensasikan ke masa pajak berikutnya. Namun jika setiap bulan terjadi lebih bayar, maka jumlah kelebihan pembayaran pajak pun akan semakin merangkak naik. Akhirnya, PKP tidak selalu dapat menggunakan cara kompensasi, karena semakin besar kelebihan pembayaran pajak tentunya akan semakin memperberat *cash flow*. Bila kelebihan pembayaran PPN tersebut didiamkan, hanya akan memperberat PKP. *Potential lost* yang dialami PKP akan semakin besar bila kelebihan pembayaran PPN tersebut ditanamkan dalam bentuk tabungan atau deposito misalnya. Tentunya dengan adanya kelebihan pembayaran pajak yang tertahan di negara, PKP tidak dapat menerima penghasilan berupa bunga tabungan atau deposito. Selain itu, kompensasi kelebihan pembayaran PPN mempunyai *life cycle* yang sangat pendek dan tidak dapat menjadi opsi dalam jangka panjang. Apabila terjadi kompensasi dalam jangka waktu 12 bulan terus menerus, akan dilakukan

pemeriksaan pajak. Bila terjadi SPT lebih bayar, sebaiknya langsung diajukan restitusi.

Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran. Sampai saat ini kelebihan pembayaran PPN dengan cara restitusi menjadi hal yang kurang populer di mata PKP. Hal ini dikarenakan mitos bahwa melakukan restitusi PPN adalah lama dan teramat rumit sudah terpatrit di benak PKP. PKP merasa bahwa beban untuk membiayai administrasi perpajakan sangatlah besar, namun dalam meminta haknya sangatlah susah. Sebenarnya lama tidaknya proses ini tentunya kembali pada pembuktian apakah memang telah terjadi kelebihan pembayaran PPN atau tidak. Dalam mengajukan restitusi, PKP tentunya harus dilandasi dengan perencanaan yang matang, PKP harus dapat membuktikan bahwa uang tersebut sudah masuk ke kas negara melalui pemeriksaan pajak. Dalam proses ini, dibutuhkan langkah proaktif dari PKP yang bersangkutan. PKP harus mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan formal maupun material yang ada dan menyerahkan beberapa dokumen pendukung, misalnya dokumen atau bukti supplier. Jika Pajak Masukan tersebut sudah dilaporkan seluruhnya oleh para supplier, maka pengajuan restitusi bisa langsung dilakukan. Bila memang bisa dibuktikan oleh PKP bahwa pajak itu memang lebih bayar dan seharusnya dikembalikan, maka uang pajak itu bisa dikembalikan oleh pihak otoritas pajak. (*Indonesian Tax Review*, Volume II/Edisi 18/2013).

Tidak semua Wajib Pajak mengetahui tentang mekanisme pengajuan dan penyelesaian restitusi PPN yang benar, terkait dengan aspek formal dan

materialnya. Diharapkan dengan adanya Karya Tulis ini, Wajib Pajak dapat mengetahui alur restitusi mulai dari pengajuan permohonan hingga kelebihan pembayaran pajak dikembalikan. Sehingga apabila semua ruang lingkup tentang restitusi PPN sudah dikuasai, maka kondisi-kondisi yang dapat merugikan Wajib Pajak dapat dihindari.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis mengambil judul “Prosedur Restitusi PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Melakukan Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tampan Pekanbaru”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: Bagaimana Prosedur Restitusi PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Melakukan Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tampan Pekanbaru?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui Prosedur Restitusi PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Melakukan Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tampan Pekanbaru

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1.3.2.1 Dapat memberikan sumbangan ilmu kepada pihak-pihak terkait untuk mengetahui tentang prosedur restitusi PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak (BKP)
- 1.3.2.2 Memberikan masukan kepada masyarakat tentang perpajakan khususnya dalam hal prosedur restitusi PPN
- 1.3.2.3 Menjelaskan mengenai prosedur restitusi PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak (BKP)

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tampan Pekanbaru yang beralamat di Jl. SM Amin, Ring Road Arengka II Riau & Kepulauan Riau

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian penulis rencanakan selama 2 bulan mulai Januari sampai dengan Februari 2014

1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara

1.4.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen dari tempat penelitian

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1.4.4.1 Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di KPP Tampan Pekanbaru tentang Prosedur Restitusi PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Melakukan Ekspor Barang Kena Pajak (BKP)

1.4.4.2 Interview

Pengumpulan data melalui interview (wawancara) kepada Kepala Kantor dan pegawai bagian PPN sehingga dapat memberikan informasi terkait dengan restitusi PPN

1.4.5 Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif merupakan data dalam bentuk deskripsi dan bukan angka.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan laporan ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, analisis data dan sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan deskriptif atau gambaran umum dan struktur kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tampan Pekanbaru

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini diuraikan pengertian pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, Wajib Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), batas penyetoran, petunjuk pengisian SPT dan pajak menurut syariah

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan inti sari yang bersumber dari hasil penelitian, dan berdasarkan kesimpulan dapat dibuat rekomendasi yang berisikan saran-saran yang dapat diambil sebagai tindakan untuk mengatasi masalah yang ditemukan di lokasi penelitian

DAFTAR PUSTAKA